

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Permukiman merupakan kawasan yang menjadi tempat untuk bermukim ataupun tempat tinggal oleh masyarakat. Kawasan tersebut meliputi perkotaan atau pedesaan. Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Pasal 1 Ayat 3 BAB I Ketentuan Umum UU RI Nomor 1 Tahun 2011). Tujuan utama kawasan permukiman adalah untuk tempat tinggal manusia. Namun lebih dari itu, pembangunan atau relokasi permukiman merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik untuk mendukung kegiatan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Penggunaan lahan atau yang biasa disebut sebagai suatu aktivitas manusia pada lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan (Soegino, 2007). Adapun makna lain yang berbunyi penggunaan lahan adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi maksud pembangunan secara optimal dan efisien (Sugandhy, 2008). Kedua pendapat di atas menunjukkan bahwa budidaya tidak dapat menghindari campur tangan manusia di kawasan tersebut. Penggunaan lahan yang banyak dijumpai di kota-kota besar biasanya adalah permukiman. Hal ini disebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut melalui tingkat kelahiran, migrasi, ekonomi, dan lain-lain, yang merupakan salah satu faktor pendorong pesatnya pertumbuhan penduduk. Penggunaan lahan juga dapat berubah dalam situasi dan kondisi tertentu. Beberapa faktor mengapa penggunaan lahan dapat berubah disebabkan topografi, jumlah penduduk, aksesibilitas, nilai tanah, sarana dan prasarana, dampak lingkungan, dan lainnya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari daerah yang memiliki permasalahan kawasan kumuh. Berdasarkan data dari Dinas

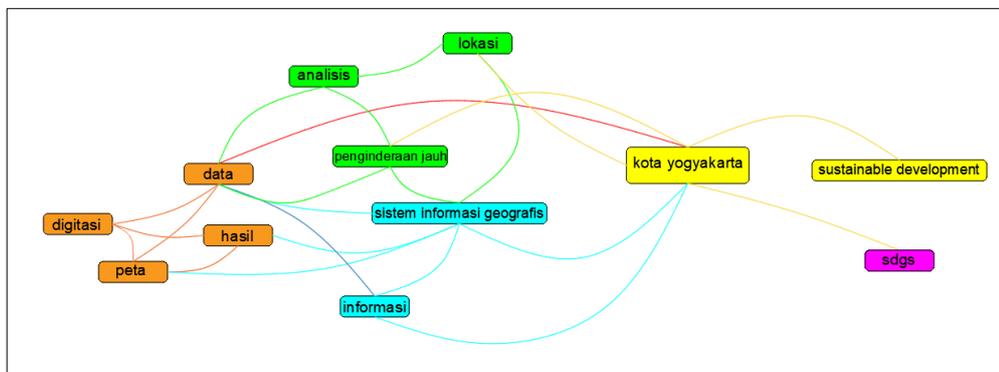
PUP-ESDM tahun 2018, wilayah tersebut memiliki sekitar 965,51 Ha kawasan yang kumuh. Namun dalam mengatasi hal tersebut, wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki penanganan untuk mengurangi tingkat kekumuhan. Berdasarkan dari Kementerian PUPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu *Best Practice* dalam permasalahan perumahan dan permukiman di Negara Indonesia.

Permukiman kumuh pada saat ini menjadi salah satu permasalahan bagi setiap negara di dunia. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni dan ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lalu pada penjelasan lainnya terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.14 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2) dijelaskan bahwa “Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari: a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; f. pengelolaan persampahan; dan g. proteksi kebakaran.”

Data spasial sudah semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Penggunaan dari data spasial sendiri mulai diterapkan oleh banyak instansi baik pihak pemerintah ataupun swasta. Tak luput dari penggunaan data spasial, dalam dunia pembangunan pun sudah tidak buta akan hal tersebut. Terlebih pembangunan berkelanjutan juga banyak memanfaatkan data spasial seperti citra satelit, data administrasi wilayah, analisis penginderaan jauh, hingga data sensus yang kemudian dirancang untuk kebutuhan informasi geografis. Maka dari itu hal ini menjadi salah satu pentingnya penggunaan data spasial untuk mengetahui perkembangan dari pembangunan berkelanjutan supaya mampu menjadi *track record* pada suatu wilayah dalam beberapa waktu ke depan.

Penggunaan analisis bibliometrik dalam penelitian ini sebagai pendekatan dalam menganalisis publikasi ilmiah dan literatur akademik dengan cara menggunakan data kuantitatif. Kemudian metode ini digunakan untuk

mengukur dan mengevaluasi dalam bidang penelitian, karya ilmiah, dan produktivitas penelitian. Secara umum metode ini digunakan dalam analisis sitasi (*citation analysis*) yang di mana kutipan dianalisis untuk mengidentifikasi karya yang paling banyak dikutip dan kutipan di antara publikasi; analisis produktivitas penulis (*author productivity analysis*), yang mengukur jumlah publikasi yang dihasilkan oleh penulis; dan analisis jurnal (*journal analysis*), yang melibatkan pengukuran dampak jurnal berdasarkan jumlah kutipan yang diterima oleh artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Berikut adalah hasil pengolahan bibliometrik yang akan digunakan sebagai acuan pengerjaan penelitian ini:



### Analisis Bibliometrik

Dari hasil yang didapatkan pada analisis di atas, arah tujuan penelitian ini beracuan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji pada kajian wilayah Kota Yogyakarta dan didapatkan dari beberapa indikator pendukung. Indikator-indikator tersebut terdiri dari antara informasi geospasial, Peraturan Menteri tentang tata ruang, dan *Sustainable Development Goals*. Pada aspek informasi geospasial yang dikolaborasikan, seperti antara “penginderaan jauh” dengan “sistem informasi geografis” yang nantinya akan menghasilkan *output* sebuah “data”. Kemudian dari “data” tersebut akan berkolaborasi dengan suatu “analisis” untuk menghasilkan suatu “digitasi”. Lalu setelah melakukan proses “digitasi”, maka akan menghasilkan *output* berupa “peta” yang nantinya akan menentukan suatu titik “lokasi” serta menjadi sebuah “informasi” untuk wilayah kajian “Kota Yogyakarta”.

Oleh karena itu, peneliti membahas rumusan masalah tentang kondisi kelayakan permukiman di Kota Yogyakarta dari hasil penyesuaian antara informasi geospasial pada tahun 2018, 2020, dan 2022, serta peta rencana permukiman layak tahun 2024 berdasarkan indikator Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 Ayat (2) di Kota Yogyakarta. Dengan demikian akan menghasilkan beberapa visualisasi peta yang menampilkan gambaran permukiman di Kota Yogyakarta. Selain membutuhkan data-data pokok, adapun data-data pendukung untuk memaksimalkan hasil dari peta yang akan tersusun. Dengan peta tersebut harapan dari peneliti adalah mampu untuk digunakan reverensi pembangunan permukiman yang layak.

## 1.2. Rumusan Masalah

- Bagaimana kondisi kelayakan permukiman di Kota Yogyakarta dari hasil penyesuaian antara informasi geospasial pada tahun 2018, 2020, dan 2022 berdasarkan indikator Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2) di Kota Yogyakarta?
- Bagaimana peta rencana permukiman layak tahun 2024 berdasarkan indikator Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2) di Kota Yogyakarta?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Karena tujuan penelitian ini harus mengacu dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis hasil perubahan kelayakan permukiman di Kota Yogyakarta tahun 2018, 2020, dan 2022 dengan menggunakan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis berdasarkan indikator Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2) di Kota Yogyakarta.
2. Memperoleh cara mempertahankan dan meningkatkan kelayakan permukiman berdasarkan *monitoring* dari peta rencana permukiman yang layak serta indikator yang terdapat pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2).

#### 1.4. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini manfaat teoritis dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang keilmuan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis yang di mana keilmuan tersebut merupakan salah satu keilmuan di bidang geospasial dan dibutuhkan hingga jangka panjang. Selain kedua keilmuan tersebut, ada pula keilmuan pembangunan permukiman yang layak untuk pembelajaran dan suatu pengetahuan bagi masyarakat secara umum. Jika ketiga keilmuan tersebut dikolaborasikan maka akan suatu tercipta pengetahuan yang terperinci tentang pembangunan berkelanjutan mengenai permukiman yang layak pada suatu wilayah dengan analisis spasial.

##### 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini akan membuahkan beberapa masalah praktis yang diselesaikan. Karena kasus yang ada di dalam penelitian ini menyangkut kegiatan geospasial, maka penyelesaiannya pun membahas tentang masalah yang ada di suatu wilayah. Contoh dari manfaat praktis tersebut antara lain:

- Hasil analisis geospasial untuk pembangunan permukiman yang layak di wilayah Kota Yogyakarta.
- Visualisasi hasil luasan kelayakan permukiman yang ada di Kota Yogyakarta.
- Saran untuk perencanaan penggunaan lahan area sungai untuk menjadikan kembali manfaat sungai seperti yang seharusnya,
- Hasil analisis perbandingan kelayakan permukiman dan kurang layak permukiman.
- Mengetahui perbandingan pembangunan di Kota Yogyakarta dari tahun-tahun sebelumnya.
- Menginformasikan beberapa referensi untuk penggunaan lahan yang sesuai dengan hasil analisis.

- Memberikan informasi pemetaan untuk perkembangan permukiman, fasilitas umum, dan hubungan terkait sosial yang ada di Kota Yogyakarta.
- Menghasilkan gambaran jalur evakuasi bencana kebakaran pada permukiman yang padat.
- Saran pengelompokan zona permukiman untuk pembuangan sampah rumah tangga.
- Visualisasi data aliran yang tercemar limbah dan sampel kualitas air.

### 3. Manfaat Kebijakan

Manfaat dari penelitian saat ini untuk Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai gambaran permukiman dan pembangunan yang layak di Kota Yogyakarta. Karena tidak semua wilayah di setiap sudut perkotaan masuk ke dalam kategori tersebut, maka harapannya penelitian saat ini mampu menjadi referensi untuk pemerintah dalam pengambilan keputusan terhadap masyarakatnya secara baik dan benar. Supaya mampu untuk menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan pemerintahnya.

## 1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini ditujukan sebagai informasi pengertian dengan detail secara terperinci terhadap suatu kata yang digunakan. Tujuan penyusunan definisi operasional sebagai meminimalisasi kesalahan pemahaman terhadap kata tersebut. Ditinjau dari judul penelitian ini adalah “Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Evaluasi Kelayakan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2018, 2020, dan 2022” maka definisi operasionalnya tersusun sebagai berikut:

### 1. Informasi geospasial

Informasi geospasial merupakan suatu informasi yang beraspek terhadap keruangan dengan menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, dan di atas permukaan bumi yang dinyatakan terhadap sistem koordinat tertentu. Informasi Geospasial dapat disusun menggunakan beberapa analisis seperti

analisis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Pengolahan dalam Penginderaan Jauh biasa dilakukan dengan bantuan foto udara dan dilakukannya *ground checking* untuk melakukan validasi data pengolahan dengan kondisi sebenarnya. Lalu data-data tersebut akan diolah kembali untuk menghasilkan suatu informasi berupa peta yang mana proses tersebut merupakan pengolahan Sistem Informasi Geografis supaya mendapatkan hasil informasi rupa bumi.

## 2. Kelayakan Permukiman

Kelayakan permukiman merupakan gambaran suatu permukiman yang layak dengan ketercapaian pada beberapa parameter. Dalam penelitian ini menentukan indikator-indikator tersebut berdasarkan yang ada pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 Pasal 18 Ayat (2). Secara terperinci penelitian ini akan menghasilkan beberapa gambaran mengenai kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.”

### 1.6. Struktur Organisasi

#### a. BAB 1

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, struktur organisasi, dan penelitian terdahulu.

#### b. BAB 2

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang tinjauan pustaka. Muatan yang terkandung dalam tinjauan pustaka adalah landasan teori penelitian untuk memperkuat penelitian dan terkandung teori-teori pendukung pada pokok permasalahan.

#### c. BAB 3

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian. Muatan yang terkandung seperti teknik penelitian. Muatan tersebut antara lain metode penelitian, lokasi penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, alat dan bahan, dan bagan alur penelitian.

d. BAB 4

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang pembahasan dan analisis. Muatan yang diadopsi dimulai dari pembahasan BAB 1 hingga 3 beserta analisis hasil pembahasannya.

e. BAB 5

Pada bab ini berisikan penjelasan tentang penutup. Muatan yang terkandung adalah kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

### 1.7. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian saat ini, peneliti menjadikan beberapa jurnal nasional sebagai penelitian terdahulu karena membutuhkan acuan yang cukup relevan. Jurnal referensi tersebut merupakan suatu penelitian yang sudah dilakukan pada waktu sebelumnya oleh peneliti lain karena tanpa adanya penelitian terdahulu, maka penelitian ini tidak akan terarah serta tidak dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Evaluasi Kelayakan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2018, 2020, dan 2022” memiliki beberapa kesamaan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Tidak dengan wilayahnya, namun kesamaan tersebut adalah metode yang digunakan, pengolahan yang dilakukan dalam penentuan wilayah permukiman, dan referensi pengolahan data yang terkandung di dalam penelitian saat ini. Rata-rata kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada bagian pengolahan data Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografis, beberapa parameter untuk menyelesaikan rumusan masalah, dan lain sebagainya.

Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data pemetaan adalah *software arcmap* 10.8 karena aplikasi tersebut sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian lainnya dan juga sangat direkomendasikan untuk pengolahan-pengolahan yang berbasis spasial. *Output* yang nantinya akan dihasilkan berupa gambaran beberapa peta hasil dari penggabungan indikator satu dengan lainnya. Sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana kondisi permukiman yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun 2018, 2020, dan 2022.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Tinjauan Pustaka	Metode	Hasil
1.	Rukuh Setiadi, Sih Jawoto, Mada Sophianingrum, dan Dhian Rosalia	2008	Indikator Pembangunan Berkelanjutan Kota Semarang	Operasionalisasi atau implementasi konsep pembangunan berkelanjutan memerlukan indikator-indikator untuk menilai efektifitasnya, dalam arti untuk mengetahui apakah suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dapat dikatakan berkelanjutan (sustainable) atau tidak berkelanjutan (unsustainable).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mengetahui progres atau pencapaian pembangunan Kota Semarang dari perspektif pembangunan.</li> <li>Mempermudah upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengidentifikasi area-area pembangunan yang diindikasikan masih lemah.</li> <li>Sebagai indikator pembandingan bagi keberhasilan pembangunan daerah yang pada umumnya hanya diukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan berkelanjutan adalah proses untuk membawa tiga proses pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.</li> <li>Konsepsi pembangunan berkelanjutan sebagai suatu teknologi mengalami popularitasnya melalui publikasi WCED (1987) yang berjudul <i>Our Common Future</i> pada saat Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED).</li> </ol>	Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi eksploratif dan komparatif. Data primer didapatkan dari sampel stakeholder pembangunan dan SKPD di Kota Semarang. Dilakukan review terhadap dokumen RPJP dan RPJMD, dan SPM bidang pembangunan dan pelayanan.	Hasil studi menunjukkan bahwa indikator yang ada selama ini belum merepresentasikan indikator pembangunan berkelanjutan karena terlalu banyak melibatkan aspek sosial dan ekonomi dan kurang memberi perhatian pada aspek pemerintahan dan terutama lingkungan hidup. Indikator fisik dan ekonomi bisa menciptakan bias dan sebagian indikator tidak bisa terukur. Hanya sebagian kecil dari SPM yang dapat digunakan sebagai landasan indikator pembangunan berkelanjutan.
2.	Yoseph Nong Maryono, Achmad Maulana Malik Jamil, dan Dwi Kurniawati	2019	Pemetaan Kualitas Permukiman dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis di	Kualitas permukiman yang diketahui dengan pemetaan yang didukung oleh Sistem Informasi Geografis dan membaginya menjadi beberapa klasifikasi.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas permukiman di wilayah Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan semakin besarnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal sehingga</li> </ol>	Penelitian ini menggunakan penelitian survey karena data yang harus diolah bukan hanya data sekunder yang didapat dari pemerintah, melainkan data primer seperti lebar jalan dan keberadaan pohon	Disimpulkan bahwa kualitas permukiman di Kelurahan Sukun termasuk kedalam Kualitas sedang. Kualitas permukiman di Kelurahan Sukun yang masuk klasifikasi sedang

			Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang			menyebabkan berkembangnya permukiman tidak terkontrol, terutama hunian liar atau permukiman kumuh yang mengakibatkan menurunnya kualitas permukiman, khususnya di daerah perkotaan	pelindung yang harus dilihat dan diukur langsung di lapangan.	dipengaruhi oleh pembangunan yang sembarangan yang mengakibatkan beberapa indikator penentu kualitas permukiman menjadi buruk. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan lagi pembangunan dalam permukiman agar kualitas permukiman tersebut tetap baik.
3.	Diana Putri Wijayanti, Murtanti Jani Rahayu, Rizon Pamardhi Utomo	2017	Ketercapaian Perwujudan Lingkungan Permukiman Layak Huni Dalam Rangka Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kabupaten Karanganyar	Kondisi sarana siaga, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pelayanan umum, ruang terbuka, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan air bersih, analisis peningkatan kondisi fisik lingkungan permukiman, analisis tingkat kesesuaian kondisi fisik lingkungan permukiman dengan kriteria permukiman layak huni, dan analisis ketercapaian perwujudan lingkungan permukiman layak huni.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian perwujudan lingkungan permukiman layak huni di Kabupaten Karanganyar dari sudut pandang normatif yaitu dengan menggunakan standar pelayanan minimum (SPM) sebagai dasar pengukuran ketercapaian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi permukiman berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2. Perkembangan perumahan dan permukiman di Indonesia tidak terlepas dari adanya permasalahan kemiskinan dan permukiman tidak layak huni, seperti halnya di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2009 terdapat 87.290 rumah tangga (RT) yang terbagi dalam empat kategori miskin.</li> </ol>	Pendekatan pemikiran dalam penelitian ini bersifat deduktif karena penelitian diuji dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian yang diangkat. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan deskriptif rasionalistik yang didasari penggunaan logika sebagai dasar penelitian dalam menanggapi fenomena yang muncul.	Kesimpulannya dengan melihat fisik Kondisi lingkungan di wilayah studi dikenal dengan kondisi fisik lingkungan mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 74,3%, sedangkan untuk tingkat kesesuaian kondisi fisik permukiman dengan kriteria pemukiman layak huni dengan rating tinggi sebesar 87,2%. Sehingga diketahui kenaikan level kesesuaian dan kondisi fisik lingkungan hunian, terwujudnya pencapaian lingkungan hunian yang layak huni agar program PLPBK di Karanganyar tercapai.

4.	I Wayan Suweda	2011	Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi	Pengelolaan perkotaan (Kapasitas daerah, SDM, Kelembagaan, Pembiayaan), manajemen keterkaitan antar kota dalam sistem perkotaan (kesenjangan kota-kota besar dan metropolitan dengan kota kecil-menengah dan perdesaan) dan melalui kerja sama antarwilayah.	Supaya mampu membangun kota yang berdaya saing dan berotonomi melalui perencanaan dan pengelolaan baru dengan strategi pengelolaan penggunaan lahan dan lingkungan.	1. Perencanaan dan pengintegrasian ruang perkotaan haruslah berdasarkan kepada potensi, kendala dan limitasi yang dimiliki.	Metode yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah metode analisis, kuantitatif, dan studi literatu.	Dari uraian dan penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti pengembangan kawasan perkotaan perlu mempertimbangkan pro growth, pro green, pro job, dan pro poor, kepemimpinan yang visioner, bentuk kelembagaan yang bersifat hybrid antar informal dan non formal, pengembangan kelembagaan kawasan metropolitan yang lebih otoritatif, dan lain sebagainya.
5.	Shelly Yunita Adianti	2020	Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto)	Kondisi sosial dan lingkungan di Kota Mojokerto mengalami penurunan ditandai dengan beberapa hal yaitu polusi akibat beban emisi, belum optimalnya transportasi publik, tidak optimalnya pengelolaan sektor informal, hingga alih fungsi lahan.	Untuk mengetahui efektifitas yang maksimal dalam pembangunan atau perencanaan tata ruang dan mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan.	1. Menurunnya kondisi sosial dan lingkungan secara global, memunculkan konsep global pembangunan berkelanjutan ( <i>sustainable development</i> ).	Fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis konsepsi kota berkelanjutan perencanaan tata ruang wilayah Kota Mojokerto dalam perspektif stakeholders. Penelitian ini menganalisis Perda RTRW dengan kriteria konsep kota berkelanjutan, melalui pendekatan perspektif stakeholders. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian dekriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Konsep kota berkelanjutan inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkritisi RTRW Kota Mojokerto dengan didasari oleh kriteria 5E (Economy, Equity, Ecology, Engagement, dan Energy). Pemangku kepentingan (stakeholders) memiliki banyak pengaruh dalam perumusan substansi perencanaan tata ruang, sehingga kriteria 5E mengkritisi Perda RTRW ditinjau melalui sudut pandang perspektif stakeholders.
6.	Ngakan Gd. A. Khrisna Wiryananda, Hayati Sari Hasibuan, dan Taufan Madiasworo	2020	Kajian Pemanfaatan Ruang Kota Berkelanjutan (Studi Kasus di Kota Denpasar)	Pemanfaatan ruang yang terjadi di Kota Denpasar belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, khususnya dari sisi berkelanjutan. Pemanfaatan ruang Kota Denpasar seharusnya mampu	Menganalisis dampak pemanfaatan ruang pada aspek lingkungan, menganalisis dampak pemanfaatan ruang pada aspek ekonomi, dan erumuskan pemanfaatan ruang kota berkelanjutan dari sisi lingkungan dan ekonomi.	1. Penataan ruang di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan yaitu metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Denpasar.	Hasil penelitian menunjukkan selama kurun waktu 2011 sampai 2015 penggunaan lahan untuk pemukiman, pariwisata, dan sawah belum sesuai dengan RTRW Kota Denpasar 2011-2031. Dampak pemanfaatan ruang pada aspek lingkungan dan ekonomi mengarah pada tidak berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari nilai indeks lingkungan tahun 2011 yaitu 1,065

				untuk membuat berlanjutnya aspek lingkungan dan ekonomi. Faktanya aspek ekonomi terus mengalami pertumbuhan, tetapi mengabaikan aspek lingkungan.				terus menurun menjadi 1,056 pada 2015. Nilai indeks ekonomi cenderung mengalami penurunan yaitu 1,012 tahun 2011 menjadi 0,992 tahun 2015.
7.	Agustina Rohiani	2021	Perencanaan Penataan Ruang Desa Berkelanjutan Sebagai Potensi Desa Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan	Pemerintah Desa harus melakukan penataan ruang desa terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, sehingga mengetahui potensi dan rencana pembangunan yang ada di wilayahnya, serta menyadari pentingnya dilakukan penataan ruang desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan komparatif.	Desa menjadikan pembangunan desa lebih bersinergi, terarah, dan berkelanjutan, dapat menekan terjadinya konflik antar kepentingan, berperan sebagai pengendali pemanfaatan ruang di wilayah desa agar tetap sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga tingkat kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.	1. Masalah utama yang mendasari penelitian ini adalah belum pahaminya Pemerintah Desa tentang penataan ruang desa, belum optimalnya sinergitas antara RPJM Desa dengan RPJM di Kabupaten dan Provinsi, karena hampir seluruh Kepala Desa tidak mengetahui rencana pembangunan di desanya yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD Kabupatennya.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan komparatif. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, media internet, dan buku-buku pendukung. Data pendukung digunakan dari hasil piloting yang telah dilakukan tahun 2019 di 40 desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.	Penataan ruang desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Desa dan belum memiliki pedoman, maka Pemerintah Pusat atau daerah sudah semestinya menyusun Pedoman Rencana Penataan Ruang Desa dan segera melakukan sosialisasi serta edukasi.
8	Nifsu Naharil Mufarikah, Sigit Heru Murti	2016	Evaluasi Perkembangan Lahan Permukiman Berkelanjutan Penginderaan Jauh dan	Penelitian ini merupakan integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi dalam mengevaluasi perkembangan lahan	1. Mengkaji kemampuan citra Quickbird dalam menyadap informasi beberapa parameter kesesuaian lahan permukiman.	1. Kota mempunyai peranan penting sebagai titik pusat pertumbuhan dan pusat aktivitas ekonomi, sosial maupun budaya.	Metode penelitian adalah interpretasi citra, uji interpretasi dan pengambilan data lapangan. Pengambilan sampel dengan metode stratified random sampling.	Evaluasi perkembangan lahan permukiman di Kota Magelang dan sekitarnya didominasi oleh tingkat kesesuaian satu atau sangat sesuai.

			Sistem Informasi Geografis di Kota Magelang dan Sekitarnya Tahun 2015	permukiman berdasarkan kesesuaian lahan permukiman.	2. Memetakan hasil evaluasi perkembangan lahan permukiman di Kota Magelang dan sekitarnya menggunakan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis.	2. Pendekatan berbasis spasial untuk kajian evaluasi perkembangan lahan permukiman perkotaan memerlukan data spasial kawasan permukiman yang rinci dan detil.		
9	Sulistyo Putro Nugroho, Noorhadi Rahardjo	2014	Visualisasi Arah Perkembangan Permukiman di Kota Yogyakarta dari Tahun 1987 - 2007	Bagaimana hasil arah perkembangan permukiman Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun?	1. Mengkaji arah dan luas perkembangan permukiman di Kota Yogyakarta tahun 1987-2007 2. Memvisualisasikan arah perkembangan permukiman di Kota Yogyakarta dari tahun 1987-2007.	1. Perkembangan permukiman di perkotaan lebih cepat, maka penginderaan jauh dapat digunakan untuk mendapatkan data penggunaan lahan dengan lebih rinci, akurat, dan efisien dengan melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur interpretasinya.	Analisis arah perkembangan permukiman diperoleh dengan membagi wilayah Kota Yogyakarta menjadi empat kuadran. Luas perkembangan permukiman diketahui dari perhitungan rata-rata perkembangan lahan permukiman di Kota Yogyakarta	Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan bahwa arah perkembangan permukiman yang terjadi di Kota Yogyakarta dari tahun 1987 hingga tahun 2007 menyebar kesegala arah dengan luas perkembangan yang berbeda-beda dimana perkembangan tersebut dominan lebih ke arah tenggara dengan luas pertambahan 447,36 Ha.
10	Kholisna Putri, Mohammad Agung Ridlo	2023	Studi Literatur: Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan	Penanganan permukiman kumuh perkotaan menuju program pemerintah "KOTAKU" (Kota Tanpa Kumuh)	Melakukan manajemen pengendalian permukiman menuju kota tanpa kumuh dan difokuskan pada strategi penanganan permukiman kumuh di perkotaan	1. Fenomena urbanisasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan suatu kota terutama dari segi jumlah penduduk.	1. Kualitatif 2. Studi literatur <i>review</i>	Upaya penanganan permukiman kumuh di perkotaan perlu diimplementasikan melalui penyusunan rencana program kreatif dari pemerintah setempat dengan pola yang tepat sehingga dapat mengurangi tingkat kekumuhan di lingkungan permukiman perkotaan.